

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 15

Pencairan Banpol Tunggu Audit BPK

UNGERAN - APBD Kabupaten Semarang tahun anggaran 2017 mengalokasikan dana bantuan keuangan partai politik (banpol) sebanyak Rp1.115.981.000. Penyaluran dana tersebut menunggu audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas penggunaan dana banpol di tahun 2016.

"Saat ini audit BPK masih berproses, jadi belum bisa cair. Aturannya memang demikian, menunggu hasil audit atas penggunaan dana itu di tahun sebelumnya," ungkap Kepala Kantor Kesatuan, Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Semarang Haris Pranowo kemarin.

Menurut Haris, dana banpol diatur di UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Permendagri No 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik serta Permendagri No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Per-

"Aturannya memang demikian, menunggu hasil audit atas penggunaan dana itu di tahun sebelumnya."

HARIS PRANOWO

Kepala Kesbangpol Kabupaten Semarang

mendagri No 77 Tahun 2014.

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan pencairan banpol dengan memperhatikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. Artinya dana banpol bisa dicairkan setelah ada LHP BPK. "Setelah LHP BPK keluar, perkiraan kami dua bulan lagi, parpol mengajukan banpol dilengkapi persyaratan administrasinya. Nanti akan diverifikasi oleh tim yang terdiri KPU, Inspektorat, DPPKAD, Bagian Hukum Setda dan Kesbangpol," jelasnya.

Besaran dana banpol pada tahun ini masih sama dengan

tahun 2016. Diperuntukkan bagi sembilan parpol yang punya kursi di DPRD setempat hasil pemilu legislatif (pileg) 2014. Yakni PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, PAN, PKS, Demokrat, Gerindra dan Hanura. Jumlah banpol yang diterima masing-masing parpol variatif, mengacu hasil perolehan suara sah pileg 2014 atau berdasar kursi di DPRD.

Rincinya PDI Perjuangan mendapat sekitar Rp263,8 juta, Golkar (Rp118,6 juta), PKB (Rp133,6 juta), PPP (Rp99,4 juta), PAN (Rp106,15 juta), PKS (Rp103 juta), Demokrat (Rp85,6 juta), Gerindra (Rp115,9 juta) dan Hanura (Rp89,5 juta).

Staf Bina Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik Kesbangpol, Yuni Indrasari menambahkan pemanfaatan dana Banpol untuk pendidikan politik sebesar minimal 60% dan sisanya untuk membiayai operasional kesekretariatan. "Pendidikan politik itu berupa seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan dan *workshop*," katanya.

● agus joko